

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 memberikan penjelasan bahwa hak untuk berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat adalah hak warga negara yang harus dilindungi, serta dijamin haknya oleh suatu negara maupun pemerintah. Hak asasi manusia adalah hak yang menjadi landasan bagi semua warga negara untuk memperoleh haknya untuk dimiliki sebagai bentuk manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kepentingan dalam Pasal 28 terletak pada fungsinya sebagai pilar kebebasan demokrasi yang harus dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai Lembaga yang memiliki kekuasaan memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4), perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kata kunci: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 , Kebebasan Berserikat-Berkumpul-serta Menyatakan Pendapat, Pemerintah

ABSTRACT

Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explains that the right to associate, assemble, and express opinions are the rights of citizens that must be protected, and their rights are guaranteed by a state or government. Human rights are rights that are the basis for all citizens to obtain their rights to be owned as a form of human being that is protected by the Constitution of the Republic of Indonesia along with other laws and regulations, namely in Law Number 9 of 1998. The importance of Article 28 lies in its function as a pillar of democratic freedom that must be protected by the government. The government that carries out its function as an institution that has power has an obligation to protect human rights, as regulated in Article 28I paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia, the protection, advancement, enforcement, and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government.

Keywords: *1945 Constitution article 28 - freedom of association - assembly - and expressing opinions, Government*